

**KEDUDUKAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

TESIS

Oleh

**VANDY STEVE POSUMAH
(2402198055)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**KEDUDUKAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

VANDY STEVE POSUMAH

(2402198055)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vandy Steve Posumah

NIM : 2402198055

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 02 Februari 2026



VANDY STEVE POSUMAH
NIM: 2402198055



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“KEDUDUKAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA”**

Oleh:

Nama : Vandy Steve Posumah
NIM : 2402198055
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 02 Februari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA
NIP/NUPTK: 091692/6358738639130043

Dr. Andrew Betlehn, S.Kom., M.M., S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 211023/9663765666130242

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Paldiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Hendri Javadi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 02 Februari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Vandy Steve Posumah
NIM : 2402198055
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA

Sebagai Ketua

2. Dr. Andrew Betlehn, S.Kom., M.M., S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 02 Februari 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vandy Steve Posumah
NIM : 2402198055
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **“KEDUDUKAN HUKUM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN
MINAHASA UTARA”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlat



Jakarta, 02 Februari 2026

VANDY STEVE POSUMAH
NIM: 2402198055

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis dengan baik dan tepat waktu, dengan Tesis yang berjudul **:"KEDUDUKAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA"** Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Dosen Pembimbing I, dan kepada yang terhormat Dr. Andrew Bethlen, S.Kom., M.M., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya Tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Guru Besar, Dosen, dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu :

1. **David Maruhum Lumban Tobing, S.H., M.Kn** Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. **Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.,** Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sekaligus Dosen Pembimbing I.
3. **Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.,** Dekan Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. **Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.,** Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. **Dr. Andrew Bethlen, S.Kom., M.M., S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing II pada Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak arahan yang sangat berharga untuk dapat terselesaikannya Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang

tidak penulis sebutkan satu per satu.

7. Secara khusus penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Ibu Hanny T. Tambani, S.Sos., M.Si yang selalu memberikan dorongan dan support yang luar biasa sehingga saya boleh tergerak untuk mengembangkan diri, mengikuti dan menyelesaikan program magister ini.
8. Karya ini saya persembahkan untuk Orang tua, Istri serta anak-anak yang senantiasa merindukan keberhasilan dan selalu menjadi penyemangat meraih cita-cita.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang Hukum Tata Negara.

Jakarta, 02 Februari 2026

VANDY STEVE POSUMAH
NIM: 2402198055,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kegunaan Penelitian.....	28
E. Kerangka Pemikiran.....	29
F. Metode Penelitian.....	32
G. Orisinalitas Penelitan	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Tinjauan Umum Teori.....	50
B. Tinjauan Umum Pembangunan Daerah	73

BAB III KEDUDUKAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	82
A. Analisis Kedudukan Hukum berdasarkan Definisi dan Teori Hans Kelsen	82
B. Analisis Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	105
C. Analisis Kedudukan Hukum RPJPD terhadap Dampak Pilkada Serentak dan Inpres 1 tahun 2025 berdasarkan Teori Gustav Radbruch: Konflik Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif.....	137
BAB IV IMPLIKASI HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK BERSUMBER PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	164
A. Identifikasi dan Analisis Potensi Peran Hukum Akibat Ketidaksesuaian Dokumen Perencanaan dengan RPJPD	164
B. Implikasi Hukum Ketidakselarasan RPJPD dalam Sistem Hukum Nasional	178
BAB V PENUTUP.....	182
A. Kesimpulan	182
B. Saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA	186

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Linimasa Perubahan Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia	3
Tabel. 2 Kerangka Perbandingan GBHN dan SPPN	12
Tabel. 3 Dokumen Perencanaan Daerah dan Hubungannya dengan RPJPD.....	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran	30
Gambar 2. Rantai Validitas	56
Gambar 3. Rantai Validitas	57

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998 yang menghapus Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan menggantikannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perubahan tersebut, bersamaan dengan penguatan otonomi daerah, menempatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai instrumen hukum strategis untuk menjamin konsistensi pembangunan daerah selama 20 tahun. Namun, dalam praktiknya, konsistensi RPJPD menghadapi tekanan kontemporer berupa dinamika Pilkada Serentak serta kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang berpotensi mengganggu kesinambungan dokumen perencanaan turunan (RPJMD/RKPD) dan menimbulkan disharmoni norma dalam kerangka negara hukum. Tinjauan pustaka penelitian ini bertumpu pada Teori Hierarki Norma (Stufenbau Theory) Hans Kelsen untuk menganalisis validitas dan relasi berjenjang norma perencanaan (RPJPN-RPJPD-RPJMD-RKPD) dalam sistem hukum Indonesia, serta Teori Trilogis Nilai Hukum Gustav Radbruch untuk mengevaluasi dampak kebijakan politik dan fiskal terhadap kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus, melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan terkait SPPN, pemerintahan daerah, pilkada, serta dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis secara kualitatif melalui analisis normatif-sistematis dan tematik untuk menilai kedudukan hukum RPJPD serta implikasi hukum apabila perencanaan pembangunan daerah tidak bersumber pada RPJPD.

Pembahasan menunjukkan bahwa RPJPD secara formal memiliki kedudukan mengikat sebagai Peraturan Daerah yang memperoleh validitas dari norma lebih tinggi, tetapi secara fungsional rentan mengalami degradasi akibat ketidaksinkronan siklus politik dan tekanan kebijakan fiskal, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum perencanaan, mengurangi kemanfaatan pembangunan berkelanjutan, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan di daerah.

Kata kunci: RPJPD; SPPN; hierarki norma; Pilkada serentak; efisiensi anggaran..

ABSTRACT

This research is motivated by the major transformation of Indonesia's constitutional and governance system after the 1998 Reformasi, particularly the abolition of the State Policy Guidelines (GBHN) and their replacement by the National Development Planning System (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN) through Law No. 25 of 2004. Alongside strengthened regional autonomy, this shift positioned the Regional Long-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD) as a strategic legal instrument intended to ensure the continuity and consistency of regional development over a 20-year horizon. In practice, however, the consistency of the RPJPD is increasingly challenged by contemporary variables, namely the dynamics of simultaneous local elections (Pilkada Serentak) and fiscal consolidation pressures, including budget efficiency policies under Presidential Instruction No. 1 of 2025. These factors may disrupt the coherence of derivative planning documents (RPJMD/RKPD) and generate normative disharmony within the framework of a rule-of-law state. The literature review is grounded in Hans Kelsen's hierarchy of norms (Stufenbau Theory) to examine the validity and tiered relationships of planning norms (RPJPN–RPJPD–RPJMD–RKPD) within Indonesia's legal system, and Gustav Radbruch's triadic legal values to assess how political and fiscal interventions affect legal certainty, utility, and justice in regional development planning.

The study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, historical, and case approaches, supported by document analysis of relevant legislation on SPPN, regional governance, elections, and regional planning instruments. Data are analyzed qualitatively through systematic-normative and thematic analysis to determine the legal status of the RPJPD and the legal implications when regional development planning is not derived from the RPJPD.

The discussion indicates that, while the RPJPD formally holds binding force as a regional regulation whose validity is derived from higher norms, its functional authority is vulnerable to erosion due to misaligned political cycles and fiscal policy pressures potentially weakening planning-related legal certainty, reducing the utility of sustainable development efforts, and producing injustice in the distribution of development benefits at the regional level.

Keywords: RPJPD; SPPN; hierarchy of norms; simultaneous local elections; budget efficiency.